

TEORITISASI DIALOG LINTAS AGAMA DALAM KAJIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER

Renaldo Benarrivo¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Jenderal Achmad Yani,

renaldo.benarrivo@staff.unjani.ac.id

Abstract

Interfaith dialogue has not gained a strategic place in the context of the study of international relations yet, even though its existence has practically provided new dynamics in the constellation of contemporary international relations. Not only that, interfaith dialogue also has sufficient theoretical urgency as a academics study that needs to be continuously developed. The debate between realism and idealism continues to develop in contemporary international relations studies. This development is influenced by the expansion of the meaning of actors who not only talk about state actors but also non-state actors, the expansion of the issues was originally focused on hard political issues but also focus to the discussion on low political issues, as well as how the interaction between actors with the religious discussion of these issues has created varied patterns of relations between actors in the study of international relations. This study attempts to place the phenomenon of interfaith dialogue theoretically in the study of international relations through a rational perspective, by seeking a middle ground between the realism and idealism debates. The English School approach, foreign policy, and diplomacy will try to be presented so that the theoretical position of inter-religious dialogue will become clear as a phenomenon that continues to develop in the study of international relations. The importance of this research is to provide the possibility of a wider variety of studies in the context of international relations, so that the existence of international relations as a scientific discipline can be optimized for its contribution to analyzing social phenomena across national borders that occur and growing.

Keywords: *The English School, foreign policy, diplomacy.*

PENDAHULUAN

Dinamika politik global kontemporer terus berubah dan dipengaruhi oleh berbagai macam determinan baik itu dalam konteks internal maupun dalam konteks eksternal. Hal ini membuat pemangku kebijakan di bidang hubungan internasional perlu senantiasa adaptif menyesuaikan

diplomasi dalam rangka menjaga relevansi kepentingan nasional negara dalam tataran global (Roy, 1991). Sehingga saat ini diperlukan pemikiran yang komprehensif dalam mengkonstruksi kebijakan luar negeri. Kebijakan seyogyanya dirumuskan dengan mengedepankan cara pandang *inward-looking* dan juga *outward-looking* dalam rangka menjaga kesinambungan kebijakan.

Diplomasi mengalami perkembangan yang begitu signifikan dengan tidak lagi merujuk pada prinsip-prinsip awal yang bersifat konservatif, dimana definisi berbagai macam aspek dalam studi hubungan internasional senantiasa berkembang dan berubah. Banyak aspek dalam berbagai ruang lingkup lingkungan strategis yang turut mendorong terjadinya perubahan-perubahan tersebut. Pasca perang dingin, tidak dapat dipungkiri bahwa isu-isu seputar kemanusiaan mulai mendapat tempat di hati dan pikiran masyarakat umum khususnya pengkaji hubungan internasional. Semakin timbul kesadaran di masa-masa ini bahwa subjek dalam hubungan internasional tidak hanya saja berbicara terkait peran negara, tetapi juga seluruh entitas yang terkait dan mengkonstruksi keberadaan negara tersebut. Pembahasan mengenai politik dan keamanan tidak lagi menjadi diskursus tunggal di era multipolarisme (Djelantik, 2008). Lebih dari itu, konsepsi politik dan keamanan juga kemudian memiliki pemaknaan-pemaknaan baru yang terderivasi dari makna-makna sebelumnya. Belum lagi munculnya isu-isu baru yang tidak dapat dinegasikan urgensi pembahasannya disamping isu politik dan keamanan misalnya isu ekonomi dan juga isu-isu lain terkait dengan sosial dan budaya.

Pasca perang dingin, kelompok-kelompok masyarakat, baik itu yang terinstitusionalisasi maupun tidak, mulai menemukan signifikansi perannya. Hal ini yang secara teoritis coba diakomodir oleh konsepsi diplomasi multi jalur (*multi track diplomacy*). Kementerian luar negeri tidak lagi dapat memonopoli hubungan-hubungan yang bersifat lintas batas negara, justru tidak jarang signifikansi peran masyarakat dalam hubungan internasional, lebih mampu membangun atensi publik terhadap suatu isu

yang dibahas, dibandingkan dengan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh negara (Hermawan, 2007). Hal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap derasnya arus informasi yang dalam konteks pertukaran ide dan gagasan yang dalam prosesnya mulai banyak melintasi batas-batas yurisdiksi atau sekedar batas geografis sebuah negara.

Konstelasi politik global kontemporer mendorong interaksi antar negara berlangsung dengan semakin intensif dalam berbagai macam *platform*. Interaksi yang dimaksud adalah interaksi antar negara secara multilateral, walaupun di sisi yang lain interaksi yang bersifat bilateral juga tetap tidak kehilangan relevansinya (Roy, 1991). Belum selesai perang dingin memberikan perubahan yang luar biasa dalam konteks pola hubungan maupun interaksi antar aktor dalam hubungan internasional, kini pandemi global Covid-19 turut memberikan dampak yang luar biasa. Diplomasi maupun pertemuan antar negara baik itu secara multilateral juga bilateral sangat terpengaruh dan bahkan sempat berhenti sejenak sebagai akibat adanya pandemic global ini. Fokus negara seketika teralih secara bersama-sama untuk membahas isu-isu kesehatan dan isu terkait lainnya secara internasional.

Walaupun sempat dikagetkan oleh adanya pandemi global Covid-19, hal ini tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan terhadap interaksi antar negara khususnya dalam konteks hubungan yang akomodatif dan kooperatif. Interaksi justru semakin meningkat guna menemukan solusi atas pandemi yang menyedot banyak perhatian publik dibandingkan beberapa pandemi global sebelumnya sebut saja SARS dan juga MERS. Peningkatan interaksi ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dimana ruang dan waktu semakin kehilangan relevansinya. Teknologi *video conference* yang semakin berkembang, membuat pelaksanaan pertemuan internasional cenderung menjadi lebih sederhana. Aplikasi *video conference* seperti Skype, Zoom maupun Google Meet menjadi aplikasi-aplikasi yang menopang jalannya diplomasi, dengan kata lain terjadi formalisasi terhadap aplikasi-aplikasi

tersebut dari yang semula banyak digunakan hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Belum lagi teknologi transpostasi yang terus berkembang setidaknya dalam beberapa dekade terakhir, juga membuat perjalanan diplomatik kian menjadi lebih efisien dan berbiaya rendah dimana ini sangat membantu khususnya sebelum pandemi global Covid-19 terjadi.

Perkembangan teknis seperti yang telah disampaikan di atas ini membawa konsekuensi bahwa publik menjadi lebih memiliki signifikansi peran dalam konteks hubungan internasional. Hal ini terjadi bersamaan dengan munculnya kesadaran bahwa diplomasi yang dilakukan negara tidak sepenuhnya dapat menciptakan perdamaian internasional (Mc. Donald, 1991). Bahkan cukup banyak presiden yang bisa dijadikan contoh bagaimana publik justru lebih bisa untuk men-*driven* perilaku negara bukan sebaliknya. Secara teoritis diplomasi jalur pertama atau yang lebih dikenal dengan *first track diplomacy* mendapatkan tantangan yang luar biasa dari segi relevansinya untuk menciptakan perdamaian. Hal ini secara konseptual memberikan dampak terhadap *multi track diplomacy* yang dipandang sebagai pilihan alternatif yang dapat dioperasionalkan untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih stabil.

Multi track diplomacy adalah bentuk diplomasi yang lebih adaptif terhadap fenomena-fenomena yang terjadi beriringan dengan globalisasi. Peningkatan peran publik dalam konteks diplomasi adalah salah satu hal yang secara konseptual diakomodir oleh keberadaan *multi track diplomacy*. Dalam *multi track diplomacy* salah satu jalur yang menarik dan dapat dikatakan sebagai alternatif untuk menciptakan perdamaian adalah jalur ke-tujuh yaitu penggunaan agama dengan berbagai entitas yang ada di dalamnya untuk tujuan-tujuan damai (Rakhmawati, 2010). Agama dianggap memiliki peluang untuk menjadi katalisator serta menjembatani perbedaan persepsi yang dapat menjadi awal mula konflik khususnya konflik yang berbasis pada isu-isu seputar identitas antara dua pihak yang berkonflik.

Penggunaan agama sebagai salah satu instrumen diplomasi bisa jadi dipandang sebagai sesuatu yang sangat sensitif terlebih lagi isu ini dibahas di dalam ruang publik. Terbukti begitu banyak konflik-konflik khususnya *insta-state conflict* dibumbui oleh isu-isu agama dan tidak jarang diantaranya menjadi konflik yang terbuka (Benarrivo, 2016). Namun dalam hal penggunaan agama sebagai salah satu instrumen diplomasi, perspektif yang digunakan lebih kepada universalitas yang ada dalam nilai-nilai agama. Nilai-nilai universal itu terkait dengan cinta dan kasih yang dapat digunakan dan dikuatkan untuk tujuan-tujuan perdamaian (Nurcholis dan Dja'far, 2015). Sulit memang mendefinisikan bahwa semua ajaran agama itu baik, karena pemikiran yang subjektif pasti akan menolak itu, tapi disadari atau tidak memang agama mengajarkan tentang perdamaian, dan begitu banyak pelajaran-pelajaran yang diambil dari agama dapat dijadikan sebagai pedoman baik itu untuk meresolusi konflik maupun memelihara perdamaian yang tetap relevan termasuk dalam konteks kekinian.

Dalam kajian hubungan internasional memang isu agama tidak menjadi salah satu diskursus penting di awal perkembangan kajian ini. Tetapi isu agama pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan kajian hubungan internasional itu sendiri terutama jika dipandang yang sudut pandang kajian hubungan internasional yang eropa-sentris. Tetapi lama-kelamaan berbagai macam fenomena sosial-budaya lintas batas negara yang terjadi memberikan ruang bagi agama untuk mendapatkan relevansinya dalam konteks yang lebih modern. Agama memang ibarat memiliki dua sisi mata uang yang memiliki makna berbeda dalam perkembangan kajian hubungan internasional. Satu sisi agama dianggap sebagai peluang dalam menciptakan perdamaian dunia, tetapi perlu diakui juga bahwa begitu banyak fenomena menunjukkan bahwa agama dapat menjadi tantangan dalam menciptakan perdamaian dunia, hingga berujung pada munculnya paham sekularisme yang coba memisahkan agama dalam tata kelola negara.

Secara fenomenologis, isu agama memang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kajian hubungan internasional. Globalisasi telah membawa dunia ini pada suatu kondisi dimana batas-batas geografis tidak sepenuhnya dapat diartikan pula sebagai batas-batas sosial-budaya yang semakin bias. Hal ini menjadi konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat. Dalam pola hubungan yang bersifat akomodatif dan kooperatif antar negara, agama kerap kali dijadikan sebagai instrumen diplomasi dalam bentuk dialog lintas agama. Dialog lintas agama adalah salah satu upaya yang menandingi narasi mengenai *the clash of civilization* dengan mengusung *harmony among civilization*. Agama dianggap dapat menjadi salah satu instrumen yang memberikan pengertian atas bagaimana setiap peradaban memandang dunia dan segala perkembangannya.

Poin utama dari dua narasi ini adalah bagaimana hubungan antar peradaban yang bertumpu pada keyakinan atau agama dapat dikonstruksi baik itu ke arah yang positif hingga tidak menimbulkan kompetisi berujung konflik atau bahkan memanfaatkan dialog sebagai salah satu *platform* untuk membentuk rasa saling kesepahaman antar peradaban-peradaban yang ada di dunia (Huntington, 1998). Dengan fenomena-fenomena yang ada terkait dengan dialog lintas agama, maka perlu dilakukan teoritisasi khususnya dari sudut pandang kajian hubungan internasional guna mendudukan isu ini dalam kajian akademis untuk kemudian mendapatkan posisi yang tepat untuk dianalisa, dikembangkan dan dioperasionalkan dalam tataran praktis.

PEMBAHASAN

Dialog Lintas Agama sebagai “Via-Media”

Perdebatan teoritis antara realisme dan idealisme memberikan peluang terhadap berbagai macam pemikiran-pemikiran alternatif dalam konteks kajian hubungan internasional bermunculan. Salah satu pemikiran yang muncul untuk menengahi perdebatan ini adalah Mazhab Inggris atau

juga dikenal dengan *The English School*. Pemikiran ini mempertimbangkan diri sebagai penyedia “via-media” yang bergerak diantara dua posisi bertentangan. Dialog lintas agama dapat diartikan sebagai penengah dari posisi-posisi agama maupun keyakinan yang dalam konteks lain bisa saja saling bertentangan. Para pemikir Mazhab Inggris melabeli diri mereka sebagai pendukung “via-media” dalam beragam cara seperti rasionalis, gotian dan pendukung konsepsi masyarakat internasional (Little, 2009). *The English School* memberikan ruang pada politik jalan tengah yang umumnya dilambangkan dengan sikap-sikap negara yang moderat dan tidak terlalu ekstrim ke salah satu sisi baik kanan maupun kiri. Secara operasional sikap semacam ini sering ditunjukkan dengan dialog-dialog di level internasional.

Para pemikir hubungan internasional yang tergabung dalam Mazhab Inggris seperti Hedley Bull juga Martin Wight, mencoba mengetengahkan konsepsi tiga pilar utama dalam kajian hubungan internasional. Menurut Martin Wight, ketiga pilar ini menjadi cermin atas tiga tradisi di dalam studi hubungan internasional (Wight, 1991). Ketiga pilar tersebut yang populer dengan istilah *international system*, *international society* dan *world society*. Melalui ketiga pilar ini, maka kita akan dapat memahami esensi dalam kajian hubungan internasional baik itu dari sudut pandang, siapa aktor yang terlibat maupun siapa aktor yang seharusnya terlibat dalam hubungan internasional, isu-isu apa saja yang dibahas dan seharusnya dibahas dalam kajian hubungan internasional, serta kemungkinan-kemungkinan interaksi semacam apa yang terjadi antara aktor-aktor dalam studi hubungan internasional dalam membahas isu-isu terkini.

Pilar yang pertama disebut dengan sistem internasional (*international system*). Pilar ini diidentifikasi sebagai kondisi di mana terdapat kontak rutin dalam bentuk interaksi antara negara satu dengan negara lainnya. Tentu saat ini kontak rutin yang dimaksud telah berkembang dengan sangat pesat dan tentunya cenderung lebih intensif seiring dengan lebih mudahnya upaya-upaya membangun kontak untuk dilakukan. Interaksi

yang intensif antar negara ini membuat setiap kebijakan luar negeri negara lain menjadi penting untuk juga turut dihitung sebagai bahan pertimbangan guna mengkonstruksi kebijakan luar negeri suatu negara (Bull, 1977). Intensitas interaksi ini tidak hanya saja meningkatkan kontak rutin yang dilakukan, tetapi juga memungkinkan untuk terjadinya pembahasan yang lebih beragam dalam setiap kontak yang dilakukan termasuk penggunaan agama sebagai salah satu instrumen dalam diplomasi. Secara ontologis keberadaan negara tidak lepas dari kebutuhannya untuk saling berinteraksi satu sama lain karena tidak ada negara yang sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri atau bersifat autarkis (Hadiwinata, 2007).

Pilar yang kedua adalah masyarakat internasional (*international society*). Para pemikir Mazhab Inggris menyebut pilar ini dengan istilah pilar rasionalisme. Rasionalisme menurut Martin Wight, adalah pemikiran yang menekankan elemen-elemen interaksi internasional seperti diplomasi, hukum internasional dan perjanjian internasional. Rasionalisme mendasarkan pada pemikiran bahwa pertimbangan rasional membuat manusia memiliki kecenderungan *law abiding* (patuh hukum) sehingga hakikat manusia pada dasarnya adalah patuh kepada hukum maupun aturan (Wight, 1991). Rasionalisme ini menjadi pilar yang sejalan dengan nilai-nilai dalam konteks dialog lintas agama. Agama dilengkapi seperangkat aturan, nilai ataupun norma dimana secara universal nilai-nilai tersebut dapat diidentifikasi secara seragam yang berkaitan dengan perdamaian. Dengan adanya pandangan rasional ini, bahwa sesungguhnya agama kemudian bisa berkembang beriringan secara progresif dengan kemajuan jaman yang membutuhkan stabilitas. Karena pada dasarnya manusia dipercaya akan mentaati hukum-hukum yang secara rasional akan membawa keuntungan dalam hal ini tentu perdamaian.

Pilar yang ketiga disebut dengan istilah masyarakat dunia (*world society*) yang menempatkan individu, organisasi-organisasi non-negara, dan gerakan sosial sebagai aktor dalam hubungan internasional. Hedley Bull

berpendapat bahwa masyarakat dunia terdiri dari individu-individu dan kebaikan dunia yang mengidentifikasi tujuan atau nilai-nilai umum dari masyarakat secara universal (Bull, 1977). Peran dari pemuka agama yang saling berserikat dalam organisasi-organisasi berbasis keagamaan memiliki peran yang sangat sentral dalam melaksanakan dialog lintas agama. Pilar ini juga disebut revolusionis yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian abadi dengan memberlakukan moralitas yang meniadakan konflik dan perang (Hadiwinata, 2007).

Dengan adanya tiga pilar yang telah dijelaskan di atas, tentu secara konseptual hal ini tidak hanya saja membantu untuk memahami dasar konstruksi hubungan internasional secara umum, melainkan juga membuat upaya-upaya identifikasi terhadap fokus perhatian yang berbeda-beda dari aktor hubungan internasional menjadi lebih relevan untuk dapat dilakukan. Secara umum dapat dilihat bahwa hubungan internasional memberikan *range* pembahasan yang begitu luas baik itu secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis selalu terdapat celah dalam kajian hubungan internasional guna menemukan alternatif-alternatif yang dapat mengakomodir laju varian fenomena yang ada terjadi dalam politik global kontemporer. Sehingga dengan sudut pandang rasionalis sebagai “anak” hasil “perkawinan” antara realis dan idealis, maka dialog lintas agama mendapat ruang sebagai jalan tengah untuk mencapai perdamaian yang secara spesifik perdamaian diantara peradaban-peradaban dengan agama ataupun keyakinan yang beragam. Karena bukan tidak mungkin bahwa tercapainya perdamaian dunia dapat berangkat dari keharmonisan antar agama maupun keyakinan baik itu dalam konteks domestik maupun internasional. Perdamaian yang berangkat dari unsur-unsur agama inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *interfaith harmony*. Istilah ini menjadi istilah yang cukup populer dan sering dikampanyekan dalam berbagai macam kesempatan multilateral karena dianggap mampu memberikan perspektif yang lebih segar dalam kaitannya dengan meresolusi banyak konflik yang terjadi saat ini.

Menurut Sekjen PBB Ban Ki-moon (2016), *interfaith harmony* adalah prinsip-prinsip toleransi dan menghormati antara satu sama lain yang berakar pada keyakinan-keyakinan besar di dunia. Prinsip toleransi dan saling menghormati ini akan menjadi baik maknanya dalam berbagai macam konteks hubungan internasional di berbagai tingkatan. Ketaatan ini juga merupakan panggilan untuk mempromosikan solidaritas dalam menghadapi masyarakat yang menyebarkan kesalahpahaman dan ketidakpercayaan satu sama lain. Merebaknya variasi serangan terorisme yang didasari oleh nilai-nilai fundamentalis terhadap agama tertentu hingga berujung pada pemikiran yang radikal, menjadi bukti bahwa kesepemahaman dunia dalam memandang perbedaan sosial-budaya yang ada memang perlu diarahkan kepada sisi yang lebih moderat.

Pernyataan tentang kedudukan keyakinan dalam negara pasca-tradisional, yang pernah dianggap sudah terjawab oleh sekularisasi sekarang kembali menjadi kajian yang relevan. Jurgen Habermas yang notabene tidak beragama termasuk dalam pemikir yang peka terhadap tren baru ini. Habermas menegaskan bahwa keyakinan-keyakinan harus berpartisipasi dalam diskursus publik tentang kemana arah konstelasi politik global kontemporer (Suseno dalam Menoh, 2015).

Operasionalisasi Kebijakan Luar Negeri

Dialog lintas agama memang tidak melulu dibicarakan dalam konteks hubungan luar negeri. Dalam prakteknya dialog lintas agama dapat dilakukan antar sesama entitas religius yang ada di dalam negeri. Namun, Ketika dialog lintas agama dioperasionalkan dengan melintasi batas-batas negara, maka dapat dikatakan dialog lintas agama sudah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri suatu negara merupakan substansi dari hubungan internasional yang diselenggarakan sebagai sarana interaksi antar negara demi pencapaian tujuan nasional (Coplin, 1992). Bagi negara-negara yang tidak berkarakter ekspansionis yang mana ini sudah sangat jarang ditemukan saat ini seiring dengan menguatnya

semangat dekolonisasi, dialog menjadi pilihan sebagai aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya.

Sumber kebijakan luar negeri diklasifikasikan dalam determinan luar negeri dan domestik. Dalam konteks internasional, pasca peristiwa 9/11, *spotlight* mengarah terhadap agama Islam yang digeneralisir tidak toleran dan radikal. Dikaitkan dengan kondisi domestik negara-negara yang bernafaskan nilai-nilai Islam seperti Indonesia misalnya, maka ini menjadi sebuah panggilan moralistik sebagai bagian dari *international system*, *international society* dan *world society* untuk dapat membangun sebuah narasi moderat yang memberikan jawaban atas banyak kecurigaan publik internasional terhadap Islam khususnya ketika dikaitkan dengan radikalisme dan terorisme. Kebijakan luar negeri bersifat dinamis, perubahan dalam kebijakan luar negeri terjadi karena perkembangan maupun perubahan dalam tujuan yang ingin dicapai. Perubahan kebijakan luar negeri tersebut dapat dilihat melalui kebijakan luar negeri yang diambil dan dioperasionalkan dalam praktek diplomasi khususnya dialog-dialog trans-nasional.

Perubahan kebijakan luar negeri dibedakan dalam dua hal yaitu, pertama adalah perubahan akibat pergantian rezim atau transformasi negara. Kepemimpinan rezim yang memainkan isu negara dalam porsi yang tepat guna menjadi instrumen dari operasionalisasi kebijakan luar negeri akan membuat inisiasi mengenai dialog lintas agama memiliki signifikansinya sendiri. Kedua adalah perubahan yang terjadi ketika pemerintahan yang berkuasa memutuskan arah kebijakan luar negeri yang berbeda. Hal ini dapat terjadi secara revolusioner ketika urgensi tersebut datang dari luar dan mendeterminasi konstruksi kebijakan luar negeri yang adaptif. Artinya dialog lintas agama juga mencakup proses dinamis dan implementasi kepentingan nasional yang relatif terhadap faktor situasional yang sangat fluktuatif di lingkungan internasional dengan maksud mengembangkan suatu tindakan yang diikuti oleh upaya mencapai

pelaksanaan diplomasi sesuai dengan panduan kebijaksanaan yang telah ditetapkan (Marbun, 2007).

Menurut James N. Rosenau (1981), faktor utama yang membentuk pola kebijakan luar negeri secara garis besar berasal dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Dimana ketika keduanya cocok berada posisi yang mendorong pelaksanaan dialog lintas agama, maka penggunaan agama sebagai salah satu instrumen diplomasi dapat terlaksana dengan optimal. Dialog lintas agama ketika dikaitkan dengan kebijakan luar negeri dapat dikatakan sebagai mekanisme negara untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dimana tren menunjukkan agama tidak lagi menjadi diskursus yang tidak populer dibahas dalam berbagai macam forum internasional baik itu yang bersifat bilateral terlebih lagi multilateral. Maka guna mempertahankan eksistensi negara secara internasional, negara perlu memikirkan strategi-strategi survival untuk bertahan hidup dan mencapai tujuan nasionalnya dengan menyeimbangkan tekanan internal dan tuntutan eksternal dimana proses penyeimbangan itu mempunyai resiko dan bahkan kemungkinan disintegrasi jika tidak dikalkulasikan dengan baik.

Dialog Lintas Agama Dan Diplomasi

Menurut Sir Ernest Satow (1992) diplomasi adalah aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat. Negara melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau lebih luas. Upaya-upaya ini dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, *lobby*, kunjungan, dan aktivitas-aktivitas yang damai serta dapat juga terjadi dalam kondisi perang atau konflik bersenjata. Pada hakikat baik itu diplomasi maupun dialog lintas agama memiliki tugas utama yang tidak hanya berkutat seputar manajemen konflik, tetapi juga manajemen

perubahan dan pemeliharannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus ditengah-tengah perubahan yang sedang berlangsung.

Fungsi utama dari diplomasi adalah menyelesaikan berbagai perbedaan internasional dengan penuh ketenangan dan bersahabat melalui diskusi serta perundingan yang menyangkut hubungan-hubungan yang baik dan saling pengertian. Hal ini relevan dengan fenomena dialog lintas agama yang merupakan bentuk operasional dari diplomasi yang menggunakan keyakinan sebagai instrumen. Di dalamnya terjadi suatu diskusi yang mencari titik kompromi dari berbagai nilai-nilai dasar keyakinan yang ada, sehingga bisa menjadi *platform* bagi usaha menuju *harmony among civilization* khususnya *interfaith harmony* yang menjadi anti-tesis dari pandangan *the clash of civilization* milik Samuel P. Huntington. Sehingga dapat dikatakan dialog lintas agama merupakan hasil *break-down* dari diplomasi.

Diplomasi yang dilakukan suatu negara salah satunya adalah diplomasi multilateral. Pada konferensi seperti ini, lebih banyak terjadi komunikasi lisan maupun tatap muka dari pada diplomasi yang sifatnya tertulis. Selain itu, masalah-masalah yang dibahas mempunyai cakupan, jangkauan, ukuran, tingkat kehadiran, masa berlangsung, serta birokrasi yang lebih luas. Diplomasi multilateral berlangsung dalam bentuk, misalnya konferensi *ad-hoc* atau bentuk lainnya yang lebih permanen (Djelantik, 2008). Diplomasi multilateral memberikan kemungkinan paling besar untuk keberhasilan negosiasi, maka tidak jarang dialog lintas agama juga lebih sering dihelat dalam forum-forum multilateralis. Sebuah konferensi difokuskan pada satu masalah sehingga pikiran peserta terkonsentrasikan pada satu isu. Kesempatan ini mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk bersama-sama mencapai kesepakatan, selain dimungkinkan untuk diselenggarakan dalam situasi tidak resmi (Djelantik, 2008). Keberadaan organisasi-organisasi keamanan yang biasanya menjadi delegasi dan representasi negara, membuat dalam konteks diplomasi, dialog lintas

agama melibatkan lebih banyak entitas yang menjadi simbol sinergitas antara aktor negara dan aktor non-negara.

Pelibatan publik dan aktor-aktor non negara didalamnya secara lebih intensif melahirkan sebuah konsepsi diplomasi yang populer disebut diplomasi publik. Diplomasi publik pertama kali diperkenalkan oleh Edmund Gullion pada tahun 1965 (Shoelhi, 2011). Menurut Edmund Gullion, diplomasi publik adalah diplomasi yang dilancarkan oleh tokoh atau kelompok masyarakat untuk mempengaruhi opini publik dalam rangka menimbulkan kesadaran (*awareness*) atau membentuk citra positif tentang diri atau lembaga yang menaunginya dengan menggunakan cara-cara yang menyenangkan dan dapat diterima (Shoelhi, 2011). Tokoh-tokoh agama yang berserikat di dalam organisasi religius memiliki peranan penting dalam menjadi *role model* cara beragama yang moderat, tidak radikal dan menampilkan wajah yang sangat positif dari keberagamaan.

Tujuan diplomasi publik adalah menciptakan kesepahaman komunikasi antar aktor internasional dan membangun citra positif suatu negara terhadap negara lain melalui suatu interaksi antara kelompok-kelompok kepentingan. Diplomasi publik yang menggunakan agama sebagai instrumen dilancarkan dengan tujuan agar masyarakat domestik dan internasional mempunyai persepsi yang baik tentang kegiatan atau tindakan negara serta sebagai landasan sosial bagi hubungan dan pencapaian kepentingan yang lebih luas. Dialog lintas agama sebagai *second track diplomacy*, semakin berkembang seiring banyaknya konflik horizontal yang bersifat *intrastate*. Hal tersebut membuat diperlukannya sebuah solusi alternatif yang berfungsi tidak hanya saja untuk meresolusi konflik yang terjadi namun juga untuk mengembangkan kondisi damai yang tercipta menuju perdamaian yang positif.

Gyorgy Scondi (2011) mengidentifikasi empat dimensi dari diplomasi publik yaitu, dimensi pertama terkait komunikasi antara sebuah negara dan negara lain sebagai target. Dimensi kedua adalah tingkatan tujuan dari komunikasi dari satu arah (persuasi) menjadi dua arah (*relationship*

building). Dimensi ketiga adalah kemampuan untuk mempengaruhi hasil yang diinginkan, kekuatan untuk mempengaruhi ini disebut dengan *soft power*. Dimensi keempat adalah tentang waktu, apakah dalam pencapaian tujuan diplomasi membutuhkan waktu yang singkat maupun lama. Dimensi-dimensi ini dapat menjadi *guidance* dalam operasionalisasi diplomasi yang menggunakan agama sebagai instrumennya.

Dialog lintas agama memiliki peran penting dalam menjalin hubungan dan kerjasama antar negara. Dialog lintas agama termasuk kedalam bagian dari diplomasi publik dimana ini memegang peran yang semakin vital dalam menjalankan misi diplomasi sebuah negara terlebih pada situasi yang semakin menuntut integrasi beragam bidang yang sangat variatif. Beberapa aktivitas diplomasi publik termasuk dialog lintas agama ditujukan untuk membangun kerjasama, kesepahaman dari negara, budaya dan masyarakat lain, mengoreksi kesalahpahaman dan mencari area yang dapat membangun pandangan bersama (Leonard, 2002).

KESIMPULAN

Teoritisasi dialog lintas agama dalam politik global kontemporer diperlukan guna menemukan titik-titik eksplorasi secara ilmiah dalam bentuk pengembangan penelitian terkait isu dialog lintas agama kedepan, khususnya dari sudut pandang kajian hubungan internasional. Seiring perkembangan politik global kontemporer agama kemudian memiliki ruang pembahasan tersendiri khususnya dalam pemikiran-pemikiran alternatif yang bertujuan menciptakan perdamaian. Keberadaan Mazhab Inggris dinilai tepat untuk mewadahi dialog lintas agama secara praktis, mengingat ketiga pilarnya yang relevan dan saling berkaitan yaitu sistem internasional, masyarakat internasional dan masyarakat dunia.

Dialog lintas agama menjadi bagian dari kebijakan luar negeri sebuah negara ketika operasionalisasinya melintasi batas-batas negara. Dalam pelaksanaannya dialog lintas agama menderivasi teori-teori diplomasi sehingga menjadi salah satu cara negara untuk mencapai kepentingannya dengan *range* penggunaan instrumen diplomasi yang beragam. Pelibatan

publik dalam hal ini tokoh-tokoh agama, termasuk organisasi-organisasi religius yang kini kian banyak berkembang dan lebih profesional juga memberikan justifikasi teoritis dialog lintas agama yang dapat disandingkan dengan perkembangan dari diplomasi publik yang kian berkembang dalam konteks politik global kontemporer.

REFERENSI

- Nurcholis, A. & Dja'far, A. M. (2015). *Agama Cinta: Menyelami Samudra Cinta Agama-Agama*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Benarrivo, R. (2016). Diplomasi Indonesia dalam Membangun Interfaith Harmony melalui ASEM Interfaith Dialogue (2004-2009). *Jurnal Dinamika Global*, 1(01), 117 - 132. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v1i01.17>
- Marbun, B.N. (2007). *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hadiwinata, B. S. (2007). "Dari Realisme hingga Konstruktivisme", *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, Metodologi*, ed. Yulius P. Hermawan, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bull, Hedley. (1997). *The Anarchical Society*. New York: Columbia University Press.
- Coplin, William D. (1992). *Pengantar Politik Internasional*. Bandung: Pustaka Bersama.
- Menoh, G. A. B. (2015). *Agama dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsektuler Menurut Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Huntington, Samuel P. (1996). "Benturan antar Peradaban, Masa Depan Politik Dunia", *Agama dan Dialog antar Peradaban*, ed. M. Nasir Tamara dan Elza Peldi Taher. Jakarta: Paramadina.
- Leonard, Mark, et. al. (2002). *Public Diplomacy*. London: The Foreign Policy Centre.
- Little, Richard. (2009). "Kontribusi Mazhad Inggris bagi Studi Hubungan Internasional" *Refleksi Teori Hubungan Internasional ke Kontemporer*, ed. Asrudin dan Mirza Jaka Suryana. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mc. Donald, John. (1991). "Further Exploration of Track Two Diplomacy", *Timing the De-Escalation of International Conflict*, ed. Louis Kreisberg dan Stuart J. Thorson. Syracuse University Press.

- Shoelhi, M. (2011). *Diplomasi: Praktik Komunikasi Internasional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rakhmawati, N. (2010). "Interfaith Dialogue in Indonesia's Public Diplomacy", *Global*, Vol. 10 No. 1.
- Rosenau, James N. (1981). *The Study of Political Adaptation: Essays on the Analysis of World Politics*. New York: Nichols Publishing.
- Roy, S.L. (1991). *Diplomasi*, Terj. Harwanto dan Mirsawati. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djelantik, S. (2008). *Diplomasi: antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wight, Martin. (1991). *International Theory: the Three Traditions*. London: Royal Institute of International Affairs..
- Hermawan, Yulius P. (2007). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.